

## North Sumatra Palm Oil Valley:

## Solusi Industri dan Perdagangan Berbasis Kelapa Sawit Abad Ke-21

AGUS  
PAKPAHAN

Sumatera Utara (Sumut) adalah wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam hubungannya dengan perkebunan besar kelapa sawit. Catatan menunjukkan bahwa tahun ini usia perkebunan kelapa sawit di Sumut sudah mencapai 100 tahun atau sudah berlangsung empat generasi.

Pengalaman apa yang bisa kita jadikan bahan pengetahuan untuk membangun kelapa sawit 100 tahun mendatang? Apakah model pembangunan yang kita kembangkan sekarang ini akan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945? Ataukah perkebunan kelapa sawit akan menjadi akar bencana bagi Indonesia sebagaimana diwariskan oleh model pemikiran kolonial? Menjawab pertanyaan tersebut merupakan tugas kita semua. Tentu dengan referensi yang sama yaitu Pancasila dan UUD 1945.

## "Trend"

Kita perlu bersyukur dengan lahirnya ketetapan baru dari Bank Indonesia yang akan mengatur devisa ekspor. Ini penting secara makro ekonomi. Tetapi, kita perlu prihatin dengan berkembangnya *bea ekspor* atau *pajak ekspor* yang dikenakan kepada komoditas primer. Memang kita memerlukan percepatan industrialisasi berbasis pertanian di mana hasil petani menjadi sumber bahan baku utamanya, tetapi kita tidak ingin hal tersebut menjadi disinsentif bagi petani dan pertanian.

Contoh konkrit diberikan oleh Thailand dalam kasus pembatalan penjualan berasnya kepada Indonesia, mengingat negara itu ingin meningkatkan pendapatan petani padinya sesuai dengan harapan pemimpinnya. Jadi kita memerlukan "cara pandang dan teknologi baru" untuk membangun industri berbasis pertanian ini. Artinya, kita harus mengubah *trend* berpikir dan berkeyakinan baru dalam pembangunan industri dan perdagangan berbasis pertanian ini. Mengapa?

Mari kita lihat trend di Jepang sebagai bahan pembelajaran bagi kita. Pada tahun 1965 luas rata-rata petani mengolah lahan pertanian di Hokkaido adalah 4,09 hektar. Pada tahun 2005, luas rata-rata lahan yang dikelola petani di daerah ini meningkat empat kalinya menjadi

16,45 hektar. Perkembangan dengan pola serupa terjadi dengan trend luas lahan per petani di negara maju. Bahkan, rata-rata petani di Amerika Serikat sekarang sudah mencapai 200 hektar.

Setiap penurunan persentase Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian dalam total PDB Jepang, diikuti oleh penurunan lebih dari 2 persen tenaga kerja pertanian. Sebaliknya di Indonesia, untuk penurunan persentase PDB pertanian 1 persen, tenaga kerja yang keluar kurang dari 0,5 persen. Fenomena ini dapat diartikan bahwa di Indonesia, sektor pertanian yang didominasi oleh petani yang semakin mengu-rem itu ditambah beban lain, yaitu menghidupi sektor industri dan perdagangan serta sektor tersier yang tidak mampu melakukan transformasi ekonominya dengan baik.

Kita harus bisa dan kuat untuk dapat keluar dari "social trap" sebagaimana yang terjadi selama ini, yang membuat transformasi ekonomi Indonesia mengalami kegagalan.

## NSPOV

North Sumatra Palm Oil Valley (NSPOV) merupakan gagasan untuk mencari jalan keluar di atas yang dikhususkan melalui pembangunan era baru di bidang perke-lapasawitan Indonesia. Spiritnya adalah Sumut sebagai wilayah pertama pengembangan kelapa sawit di Indonesia perlu menjadi pelopor dalam sawit era abad ke-21. Kita perlu ingat akan kegagalan evolusi melampaui zaman keemasan di bidang gula yang jatuh pada 1930an; karet akhir 1960an; dan minyak bumi dan kehutanan (1980an). Sekarang, kita berada di "zaman keemasan" kelapa sawit yang mana Indonesia menjadi produsen minyak mentah sawit (MMS) utama dunia. Apakah ini akan berakhir seperti telah terjadi pada gula, karet, atau hutan?

Tanpa adanya perubahan dalam cara pandang, strategi dan kebijakan yang jelas dan konsisten maka dalam tempo kurang-lebih dari 50 tahun mendatang perkebunan akan menjadi sumber masalah bagi Sumut. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas kita bisa belajar dari apa yang berkembang di sekitar PTPN II. Di wilayah ini terdapat sekitar 500 titik konflik. Konflik ini menandakan tingginya faktor kelangkaan, khususnya lahan, sebagai akibat kegagalan transformasi ekonomi

sebagaimana diuraikan di atas, sehingga masyarakat di setiap kebun banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Hal yang serupa akan terjadi juga di wilayah-wilayah perkebunan yang semakin tinggi tingkat kepadatan penduduknya dan semakin tinggi penganggurannya.

Gagasan NSPOV dirancang untuk mengatasi hal tersebut dengan menciptakan suatu kawasan pusat industri-perdagangan-jasa-keuangan-iptek yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan kelapa sawit dan turunannya. Wilayah pengembangannya dipusatkan di areal PTPN II yang memang secara alamiah tidak cocok lagi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit mengingat di daerah sekitarnya sudah menjadi wilayah urban. Konsep ini pun sekaligus diarahkan untuk merevitalisasi kota Medan. Dengan dibangunnya NSPOV pada areal sekitar 8.000 hektar, maka akan tercipta "Kota Kelapa Sawit" yang menjadi Pusat Sawit Indonesia. Nilai investasinya, dengan wilayah pengembangan sarana dan prasarana fisik sekitar 2.000 hektar dan sisanya 6.000 hektar yang dijadikan sebagai wilayah hijau demi terwujudnya "Medan Green City", kurang-lebih diperkirakan akan mencapai Rp 400 triliun. Dengan demikian nilai PPN-nya saja akan mencapai Rp 40 triliun. Dunia usaha sudah banyak yang menunggu untuk berpartisipasi dalam pembangunan NSPOV ini. Kita masih menunggu izin dari Menteri BUMN.

Tentu kita berharap, izin Menteri BUMN akan segera turun mengingat gagasan ini sudah berproses sejak 2005, sudah melalui pembahasan dengan berbagai pihak termasuk dengan DPRD Sumatera Utara dan dengan para pemangku kepentingan lainnya di Pusat dan di Daerah. Dengan NSPOV, insya-Alah, selain lapangan pekerjaan akan berkembang nyata dan nilai tambah kelapa sawit akan meningkat, juga "bursa kelapa sawit Rotterdam akan berpindah ke Medan". Kita punya rencana, maka Tuhan Yang Maha Esa akan mengabulkannya.

PENULIS ADALAH DEPUTI MENTERI BUMN BIDANG USAHA AGROINDUSTRI, KEHUTANAN, KERTAS, PERCIPTAKAN DAN PENERBITAN 2005-2010 DAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN 1998-2003. SEKARANG MENJABAT KETUA KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK DAN KETUA UMUM GABUNGAN ASOSIASI PETANI PERKEBUNAN INDONESIA



## "Reshuffle" Besar-besaran

dari halaman 1

Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Ani Rahmawati, juga disebut-sebut bakal dipromosikan menjadi Menkeu Agus Martowardojo. Namun, Ani dikabarkan bersaing dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan untuk posisi tersebut.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin dikabarkan juga bakal dipercaya menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Purnomo Yusgiantoro. Adapun Purnomo, santer disebut menggantikan Mustafa Abubakar sebagai Menteri BUMN.

"Sebab, selama menjadi Menhan, Purnomo kerap mendorong revitalisasi BUMN untuk mendukung pertahanan," jelas sumber SP. Akan tetapi, ada nama lain yang juga masuk daftar menjadi calon Menteri BUMN, yakni pengusaha Chairul Tanjung.

Hal yang mengejutkan, nama Muhaimein Iskandar, meskipun diindikasikan terlibat kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), disebut-sebut tetap bertahan di KIB II. Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu digeser menempati pos Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang kini dijabat Helmy Faishal Zaini.

"Sedangkan Helmi diproyeksikan menjadi Menteri menggantikan Andi Mallarangeng. Ini untuk mempertahankan jatah dua menteri bagi PKB," jelas sumber.

Adapun Andi Mallarangeng, kemungkinan ditarik ke lingkaran dalam Presiden SBY. "Salah satu pos yang mungkin dijabat Andi adalah kembali menjadi juru bicara utama Kepresidenan," ujarnya.

## Hindari Transaksi Politik

Terkait rencana reshuffle, sejumlah pihak kembali berharap Presiden SBY menghindari transaksi-transaksi politik. Calon menteri harus memiliki jejak rekam yang baik dan kemampuan untuk menjalankan tugas serta fungsi sebagai menteri.

Hal ini disampaikan guru besar ilmu politik Universitas Indonesia Ibersamsjah. "Kalau transaksi politik yang terjadi, maka perbaikan kinerja pemerintahan tidak akan tercapai lagi," kata Ibersamsjah, Selasa (4/10).

Menurut Ibersamsjah, transaksi politik menjelang reshuffle semestinya dapat dihindari. Semua itu, lanjutnya, bergantung pada keputusan Presiden SBY.

Ibersamsjah menuturkan, Presiden tidak perlu tergantung kepada parpol di parlemen. Pasalnya, Indonesia menganut sistem presidensial bukan parlementer. "Oleh sebab itu, Presiden jangan sampai tersandera oleh parpol," ujar Ibersamsjah.

Dia mengemukakan, isu reshuffle memang selalu menarik untuk dibicarakan. Sudah pasti banyak orang terutama dari kalangan parpol, yang mengharapkan mendapat jabatan menteri.

"Dengan demikian, kalau reshuffle terjadi, maka yang paling ditunggunya ialah parpol, karena dilakukan secara transaksional," ucapnya.

Dia menambahkan, Presiden dapat menyerahkan

beberapa kursi menteri kepada kalangan profesional. Sebab, kalau dari kalangan parpol, yang selalu dicari adalah kekuasaan dan jabatan, berbeda dengan kalangan profesional yang tidak memiliki ambisi dan kepentingan.

"Kalau Presiden berani menyerahkan kepada kalangan profesional, rakyat masih bisa berharap tiga tahun akan ada perbaikan. Jangan lupa, kepuasan rakyat menjadi tolok ukur pemerintahan," tambahnya.

Ibersamsjah juga meyakini tidak akan terjadi pergolakan politik kalau menteri yang masuk kabinet berasal dari kalangan profesional. Walaupun terjadi pergolakan, Presiden tidak perlu khawatir. "Presiden jangan takut pada parpol. Presiden itu kan dipilih rakyat bukan oleh partai politik," tegasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy kepada SP membantah kalau reshuffle dilakukan untuk meredakan parpol yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan. "Tidak ada agenda reshuffle dilakukan untuk memuaskan parpol," ungkapnya.

Dia menjelaskan, reshuffle merupakan suatu kebutuhan, karena tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang menurun.

"Dengan reshuffle, diharapkan publik dapat menanti kepemimpinan nasional yang ada. Karena, kalau terus menerus turun, maka akan ada pembangkangan dan ketidaktaatan publik yang bisa berdampak pada pembangunan nasional," ungkapnya.

Romy juga meyakini, beberapa calon menteri yang akan masuk dalam kabinet, berasal dari parpol koalisi.

"Saya kira, kalau mengacu pada dokumen kontrak koalisi yang pernah ditandatangani maka jumlah menteri dari parpol koalisi tetap sama," tandas Romy.

## Libatkan Wapres

Secara terpisah, Presiden SBY mengemukakan, apa yang beredar di masyarakat terkait format kabinet hasil reshuffle bukan darinya. Ia mengaku tidak tahu dari mana informasi itu dan tidak pernah memberikan informasi tersebut.

"Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak tahu-menahu dengan nama-nama yang beredar. Sekarang ini, si ini mau jadi menteri ini. Menteri ini diganti oleh ini dan sebagainya. Tidak ada satupun informasi yang keluar dari saya tentang itu. Jadi di luar pengetahuan saya, sumbernya bukan dari saya," kata SBY.

Dia mengemukakan dalam penyusunan kabinet, pihaknya hanya melibatkan Wapres Boediono untuk berikan pandangan dan saran. Meski demikian keputusan ada pada dirinya sebagai hak prerogatif yang dimiliki presiden.

"Saya harus sampaikan begitu. Saya mohon pengertian masyarakat luar, jangan menilai itu sumber dari Istana atau itu berasal dari saya. Karena sekali lagi saya tidak tahu yang diusulkan menyangkut reshuffle dan calon-calon menteri, termasuk menteri-menteri yang diganti," tuturnya.

[YHD/CKP/E-8/L-8/R-14]

## Bukti Baru Tak Terbantahkan

dari halaman 1

Dia juga berharap jaksa Cirus Sinaga yang menjadi penuntut umum dalam persidangan sebelumnya dihadirkan sebagai saksi.

Menurut Antasari, penasihat hukumnya sudah menyurati beberapa kali pihak yang terkait untuk menghadiri persidangan tetapi tidak ada tanggapan. "Jika tidak hadir, kami tidak tahu alasan mereka," katanya.

Sedangkan, pada sidang PK, 22 September lalu, Antasari menghadirkan tiga saksi ahli, dokter forensik dari RSCM Abdul Mun'im Idris, ahli balistik Widodo Hardjoparwito dan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Muzakir, serta seorang saksi fakta Andi Syamsudin, adik kandung korban Nasrudin Zulkarnaen.

Dalam kesaksiannya Abdul Mun'im Idris mengungkapkan, ada kesalahan ketik dalam pembuatan visum Nasrudin Zulkarnaen.

Menurut dia, tidak ada luka di pelipis kanan korban melainkan terdapat luka luka tembak di sisi kiri kepala korban. Kesalahan ketik tersebut tidak pernah terungkap pada persidangan di tingkat pertama dan banding.

Dia mengaku, di dalam membuat kesimpulan visum tidak di bawah tekanan. "Yang heran kenapa tidak dibaca dalam sidang," tukas Mun'im.

## Mengungkap Dalang

Andi Syamsudin mengungkapkan terdapat dua orang yang bernama Jefri Sumampau dan Else Mumu. Keduanya, bersedia membantu keluarga untuk mengungkap dalang dari pembunuhan saudara kandungnya itu.

Kedua orang tersebut mengatakan, sebelum meninggal, Nasrudin sempat mendapat pesan singkat melalui telepon selular bernada ancaman. Adik korban menginginkan ada pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan keterangan detail terkait sms yang dia ketahui itu.

Ahli balistik Widodo Hardjoparwito menyebutkan, ada sebuah proyektil peluru yang masih utuh di

kepala korban. Maka ada dugaan peluru yang bersarang di kepala Nasrudin itu tidak mengalami hambatan. "Artinya, tidak menembus kaca mobil korban. Dengan begitu terdapat dugaan Nasrudin ditembak dari jarak dekat atau saat berada di dalam mobil," katanya.

Dalam persidangan, Antasari mengaku masih membutuhkan kesaksian dari paramedis RS Mayapada karena mereka yang pertama kali menerima korban Nasrudin Zulkarnaen.

Akan tetapi, upaya untuk memanggil tim paramedis yang bertugas pada 14 Maret 2009 pukul 12.00 WIB hingga 18.00 WIB tidak digubris pihak RS Mayapada. Antasari memohon kepada majelis hakim dan penuntut umum untuk turut membantu menghadirkan saksi tersebut.

Permintaan itu ditolak oleh hakim dengan alasan hakim dalam persidangan PK tidak bisa membuat penetapan.

Begitu pula penuntut umum menolak permohonan Antasari dengan alasan tugas penuntut umum adalah membuktikan dakwaan. "Tugas telah dilakukan dan selesai dilakukan. Upaya hukum pemohon mengenai saksi yang meringankan, kami tidak punya kewenangan dan kepentingan," kata jaksa Eri Satriana dalam sidang yang lalu.

Menanggapi permohonannya tidak dipenuhi, Antasari berharap di masa mendatang terpidana tidak lagi menjadi objek dalam hukum acara. Artinya, negara dapat memfasilitasi terpidana dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar dapat melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dengan upaya paksa.

"Sudah waktunya terpidana bukan lagi objek dalam hukum acara kita. Kedudukan kita sama, bukan objek, bukan subjek. Mungkin ke depan difasilitasi oleh aturan bahwa terpidana bisa melakukan pemanggilan terhadap mereka (saksi) yang harus dipenuhi sesuai dengan kapasitas penegak hukum yang lain. Seperti sekarang, kami butuh saksi RS Mayapada karena mereka yang menerima korban pertama kalinya," papar Antasari. [ECS/M-7]

## Kasus Hambalang Mulai Diusut

dari halaman 1

"Pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat masih berlangsung, bukan telah selesai, tunggu saja. Berapa pun, yang penting dua alat bukti yang disyaratkan UU telah terpenuhi. Tunggu saja proses hukum selanjutnya," kata Jasin melalui pesan singkat kepada SP, Selasa (4/10) malam.

Dikatakan, pemeriksaan terhadap tersangka tidak bergantung pada maksimal atau minimalnya jumlah pemeriksaan dari penyidik. Alasannya, yang terpenting adalah bukti-bukti terkait kasus tersebut sudah lengkap. "Yang terpenting bukti-bukti terhadap kasus suap wisma atlet untuk Nazaruddin sudah cukup," katanya.

Terkait hal itu, terpidana kasus suap wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang mendatangi Gedung KPK, Selasa (4/10) sore untuk dimintai keterangan mengenai kasus itu.

Dia mengatakan diperiksa oleh penyidik seputar

percakapannya melalui pesan singkat BlackBerry Messenger (BBM) dengan beberapa anggota DPR dan Badan Anggaran (Banggar).

Pemeriksaan tersebut, kata Rosa, mengenai istilah-istilah yang dia gunakan ketika menghubungi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh melalui BBM.

"Saya diperiksa tentang beberapa percakapan BBM antara beberapa anggota DPR dengan saya. Jadi isi percakapan itu kan banyak sekali. Tentang Bu Angie (Angelina Sondakh, Red), yang pak ketua-ketua besar, semangka, apel malang, dan yang begitu-begitu," katanya.

Disinggung, apakah dia pernah bertemu dengan salah seorang dari empat pimpinan Banggar, Rosa hanya menjawabnya dengan senyuman. "Tahu deh," katanya sambil tersenyum sebelum memasuki mobil tahanan KPK. [ECS/Ant/A-16]

## SUARA PEMBACA

Suara pembaca dikirim melalui email [opini@suarapembaruan.com](mailto:opini@suarapembaruan.com) atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku

## Mau Berapa Lagi Korbannya?

Belakangan ini kasus tindakan kriminal di alat transportasi umum sedang marak-maraknya diberitakan, seakan-akan ini adalah suatu modus kejahatan yang baru. Padahal jika kita lebih peka dan peduli terhadap keadaan sekitar, kasus seperti ini merupakan fenomena lama, yang sayangnya tidak mendapat respon serius dari pemerintah.

Contohnya saja seperti di daerah Kemanggis, Jakarta Barat. Daerah yang kebanyakan dihuni oleh mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di salah satu universitas swasta di daerah sana. Kebanyakan dari mereka adalah penghuni kosan, karena letak rumah yang jauh dari kampus atau mereka yang berasal dari luar daerah Jakarta. Nah, untuk ke kampus itu kebanyakan dari mereka yang berjalan kaki ataupun menggunakan mikrolet. Semenjak kasus salah satu mahasiswa yang tewas diperkosa dan dibunuh di mikrolet, para mahasiswa menjadi was-was akan keselamatan mereka.

Jalan-jalan di sekitar kampus walaupun ramai pada siang hari, tapi tetap saja rawan akan tindakan kriminal. Sangat banyak mahasiswa yang terancam keselamatannya dan sudah banyak kasus yang terjadi, namun pemerintah sepertinya tidak peduli akan keselamatan masyarakatnya. Tidak ada upaya serius yang dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan mereka.

Usaha-usaha yang dilakukan sejauh ini hanya "panas-panas tahi ayam", saat sedang maraknya terjadi kasus dan menjadi pembicaraan, aparat sibuk me-razia sejumlah mikrolet, namun setelah tidak dipribadikan lagi, razia-razia itu pun menghilang. Entah sampai kapan dan berapa banyak lagi korban yang berjatuhan baru pemerintah mau melakukan upaya yang real untuk mencegah ini. Saya harap ada sedikit perhatian yang ditunjukkan oleh pemerintah dan aparat terkait.

Irene Aristia  
Jl Sandang No 8  
Kemanggis, Palmerah-Jakarta Barat  
Mahasiswi Jurusan Psikologi  
Universitas Bina Nusantara

## Lindungi dari Radikalisme

Rasa ketenangan kita kembali terusik, Kota Solo, Jawa Tengah yang begitu kondusif menjadi sasaran bom bunuh diri. Gereja Bethel Injil Sepuluh di Kawasan Kepuntan, Solo, menjadi sasaran aksi biadab yang dilakukan Amat Yosepa Hayat, alias Pino Damayanto. Padahal umur masih sangat muda, tetapi Pino rela mati demi pemahaman yang sesat dan menyesatkan.

Aksi biadab sebelumnya juga dilakukan oleh Muhamad Syarif pada April 2011. Ia juga nekad meledakan diri ditengah-tengah orang yang sedang menjalankan ibadah shalat Jum'at di Masjid Al Zikra, Markas Kepolisian Resor Kota Cirebon. Ia juga memiliki pemahaman yang sama, orang yang tak sejalan dengan ideologi yang dianutnya dianggap musuh dan sah untuk dibunuh. Inilah pemahaman yang keliru yang semestinya tidak boleh berkembang, karena akan menumbuhkan bibit-bibit terorisme.

Pihak Kepolisian menyakini, dua anak muda Yosepa Hayat dan Muhamad Syarif adalah saling terkait dan mereka tergabung dalam satu kelompok pelaku pengembonan Masjid Al Zikra di Mapolresta Cirebon. Sebelumnya Yosepa Hayat masuk dalam DPO bom Cirebon bersama Yadi alias Nang Ndu, Beni Asri dan Heru Komarudin. Mereka adalah anak-anak muda yang seharusnya diharapkan menjadi pilar dan tulang punggung bangsa, namun demi ajaran ideologi yang sesat rela menjadi 'pengantin'.

Dengan dibuai doktrin bias bertemu bidarai cantik, yang kebenarannya sangat diragukan, mereka rela mati dengan cara meledakkan diri ditengah umat lain yang tak berdoosa. Aksi bom bunuh diri juga pernah terjadi di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tahun 2009 yang dilakukan oleh dua anak muda yaitu Dani Dwi Permana yang masih umur 18 tahun dan Nana Ichwan Maulana yang umur 28 tahun.

Generasi muda harus diselamatkan dari gerakan radikalisme yang mengajarkan kekerasan, karena tidak ada agama yang menganjurkan untuk bunuh diri jika ingin masuk surga.

Riris Herawati  
Gg Masjid No 24, Ciputat, Tangerang